

BAB II

ANCAMAN *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* BAGI TIONGKOK DAN ASIA TENGGARA

Pada BAB II, peneliti akan membahas tentang *Transnational Organized Crime* di Tiongkok dan Asia Tenggara, beserta jenis-jenis kejahatan yang ada di Tiongkok berdasarkan tingkat kejahatan yang paling sering terjadi. Dalam kategori kejahatan transnasional yang disepakati oleh ASEAN dan Tiongkok, peneliti membahas kejahatan perdagangan narkoba dan perdagangan manusia.

Kejahatan perdagangan narkoba dan kejahatan perdagangan manusia yang dialami oleh kawasan Asia Tenggara dan juga Tiongkok karena kedekatan geografis dan juga lemahnya pengawasan pemerintah sehingga kedua kejahatan ini berkembang pesat. Dalam bab ini juga peneliti akan membahas tentang upaya ASEAN dan juga Tiongkok dalam mengatasi kejahatan transnasional lewat pertemuan ASEAN+1 yang membahas tentang *peace and prosperity* pada tahun 1997, yang kemudian diikuti dengan pembentukan kerjasama *ASEAN China Cooperation in Response to Dangerous Drug* (ACCORD) dalam mengatasi isu kejahatan narkoba yang ada di kawasan tahun 2000.

Setelah pembentukan ACCORD, ASEAN dan Tiongkok menyadari kompleksitas dari kejahatan transnasional yang ada di kawasan Asia Tenggara dan juga Tiongkok, salah satunya kejahatan perdagangan manusia. Oleh karena itu dibentuklah *Joint Declaration ASEAN China Cooperation in the Field of Non Traditional Issue* tahun 2002, yang berisi jenis-jenis kejahatan transnasional yang ingin diatasi ASEAN dan Tiongkok, dan di dalamnya terdapat kejahatan narkoba

dan juga manusia. Tahun 2004, ditandatangani MoU kerjasama dari Joint Declaration tersebut, dan pada tahun yang sama, dalam respon isu kejahatan manusia, dibentuklah *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* (COMMIT) oleh 6 negara sungai Mekong yaitu Tiongkok, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand dan Myanmar .

2.1 Transnational Organized Crime di Tiongkok

TOC di Tiongkok semakin berkembang setelah meninggalnya Mao Zedong pada tanggal 9 September 1976, dan digantikan oleh Deng Xiaoping yang mereformasi perekonomian Tiongkok pada tahun 1978 melalui program „Reformasi dan Keterbukaan“ (*Gaige Kaifang*)³⁵. Reformasi ekonomi ini telah membawa Tiongkok kepada sebuah sistem perekonomian baru yaitu perdagangan bebas. Tiongkok mulai membuka diri terhadap dunia luar untuk berinteraksi, terutama dalam interaksi ekonomi yang membuat Tiongkok dapat melakukan perdagangan dengan negara luar, begitupula dengan negara luar dapat melakukan interaksi ekonomi dengan Tiongkok.

Reformasi ekonomi yang diharapkan bisa membawa perekonomian Tiongkok menjadi lebih baik lagi ternyata membawa dampak negatif juga bagi perkembangan kejahatan terorganisir di Tiongkok³⁶. Dengan reformasi ini, globalisasi kemudian masuk ke Tiongkok dan membawa perkembangan teknologi

³⁵ Carla Tinaningsih, 2014, *Perkembangan Ekonomi Cina Pasca Mao Zedong dan Hubungan Ekonomi Cina dengan ASEAN-CINA FREE TRADE AREA*, diakses dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2015-8/20392714-MK-Carla%20Tinaningsih.pdf> (24/05/2017, 18.30 WIB)

³⁶ M. Aidil T.W, *Adopsi Konvensi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) Terhadap Kebijakan China dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi (2006-2014)*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 2 No. 3 (2014) diakses dalam [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/jurnal%20aidil%20\(09-30-14-01-40-33\).docx](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/jurnal%20aidil%20(09-30-14-01-40-33).docx) (24/05/2017, 18.30 WIB)

informasi, komunikasi dan transportasi. Perkembangan ini ternyata membuat kejahatan terorganisir masuk dalam tahapan transnasional karena para sindikat kejahatan terorganisir memanfaatkan semua perkembangan tersebut, sehingga batas negara menjadi kabur dan dapat dijangkau.

Dalam perkembangan Tiongkok, terdapat perkembangan yang tidak seimbang hasil dari liberalisasi. Kontrol pemerintah atas wilayah Tiongkok lebih terpusat terhadap wilayah-wilayah pesisir dibandingkan dengan wilayah tengah dan perbatasan, oleh karena itu kontrol keamanan juga ikut terfokus terhadap daerah pesisir Tiongkok daripada daerah tengah dan perbatasan. Hal tersebut yang membuat kejahatan terorganisir berkembang dan terus menerus menjadi permasalahan keamanan Tiongkok karena lemahnya kontrol pemerintah yang tidak seimbang, seperti kejahatan narkoba dan juga perdagangan manusia.

2.1.1 Kejahatan Perdagangan Narkoba (Drug Trafficking)

Kejahatan Perdagangan narkoba di Tiongkok dipengaruhi berbagai faktor seperti sejarah, lokasi, ukuran, populasi, dan kondisi ekonomi saat ini yang dialami. Tiongkok memiliki seperlima populasi dunia dan ekonomi yang besar dan perkembangan opium telah memainkan peran penting dalam sejarah negara ini sejak sebelum Perang Opium Pertama dan Kedua pada pertengahan abad ke-19³⁷. Luas daratan Tiongkok yang besar, dekat dengan Segitiga Emas (*Golden Triangle*), Bulan Sabit Emas (*Golden Crescent*)³⁸, dan banyak kota pesisir dengan

³⁷ Sebastien Roblin, (2016), *The Opium Wars: The Bloody Conflicts That Destroyed Imperial China*, diakses pada <http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-opium-wars-the-bloody-conflicts-destroyed-imperial-china-17212> (29/03/2017, 21.00 WIB)

³⁸ "Bulan Sabit Emas" terletak di daerah perbatasan Afghanistan, Pakistan dan Iran. Pada akhir abad ke-20, "Bulan Sabit Emas" (*Golden Crescent*) menggantikan "Segi Tiga Emas" (*Golden Triangle*) dan menjadi tempat penghasil narkoba sejenis candu yang terbesar di dunia. "Bulan

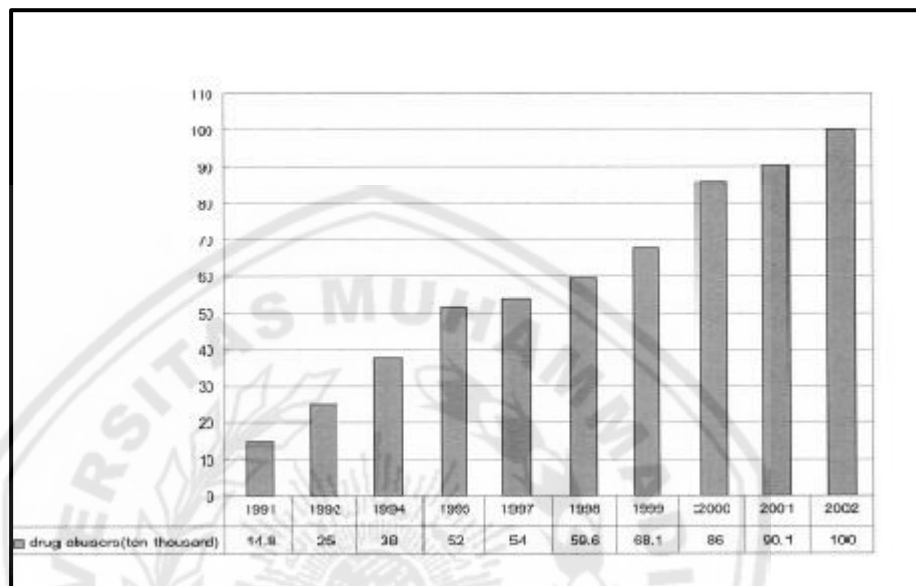
fasilitas pelabuhan besar dan modern menjadikan Tiongkok pusat transit yang menarik bagi para sindikat kriminal lintas batas. Status Tiongkok dalam perdagangan narkoba telah berubah secara signifikan sejak tahun 1980an, ketika negara tersebut untuk pertama kalinya membuka perbatasannya dengan perdagangan dan pariwisata setelah 40 tahun melakukan isolasi. Seiring perjanjian perdagangan dengan Asia Tenggara dan tempat lain meningkat, begitupula diikuti oleh perdagangan narkoba dan bahan-bahan kimia pendukung dari, ke dan melalui Tiongkok.

Penyalahgunaan narkoba di Tiongkok dimulai pada Dinasti Qing (1936-1909) saat penjajah Barat mulai memaksa Opium masuk ke negara tersebut. Sejak saat itu, masyarakat Tiongkok telah mengalami pengalaman pahit tentang narkoba selama hampir 200 tahun. Pasca tahun 1949 yang ditandai dengan berkuasanya Partai Komunis Tiongkok atas Tiongkok Daratan, terdapat lebih dari 20 juta pecandu opium³⁹. Sejak Partai Komunis Tiongkok (PKT) meresmikan Tiongkok menjadi Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah mulai membuat kampanye anti-narkoba besar-besaran, sehingga pada saat itu Tiongkok mendapatkan reputasi “Negara Bebas Narkoba” selama kurang lebih 30 tahun. Namun, reputasi tersebut berubah sejak akhir 1980, saat dimana Tiongkok melakukan reformasi ekonomi. Arus lalu lintas perbatasan antar negara yang menjadi rute perdagangan dimanfaatkan oleh para sindikat perdagangan narkoba untuk memperluas jaringan mereka ke luar Tiongkok.

Sabit Emas" berhubung dengan daerah Kashi di Xinjiang. Lihat : China Radio Internasional (CRI) pada <http://indonesian.cri.cn/1/2007/09/06/1@70890.htm> (25/03/2017, 01.00 WIB)

³⁹ US National Library of Medicine National Institute of Health, *Injection drug use and HIB/AIDS in China : Review of Current situation, prevention and policy implications*, diakses dalam <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1402269/>

Grafik 2.1⁴⁰
Grafik Penyalahgunaan Narkoba di Tiongkok



Berdasarkan grafik 2.1, sebelum tahun 1980an, kebanyakan para pemakai narkoba hanya menggunakan opium saja, dengan perbandingan pemakaian heroin yang masih sangat kecil dan penggunaanya terbatas pada daerah perbatasan Tiongkok. Dimulai pada tahun 1990an, penyalahgunaan narkoba menyebar dengan cepat , meningkat dari 70.000 pada tahun 1990 menjadi 1.000.000 pada akhir tahun 2003, mencakup 2.148 kabupaten/kota.

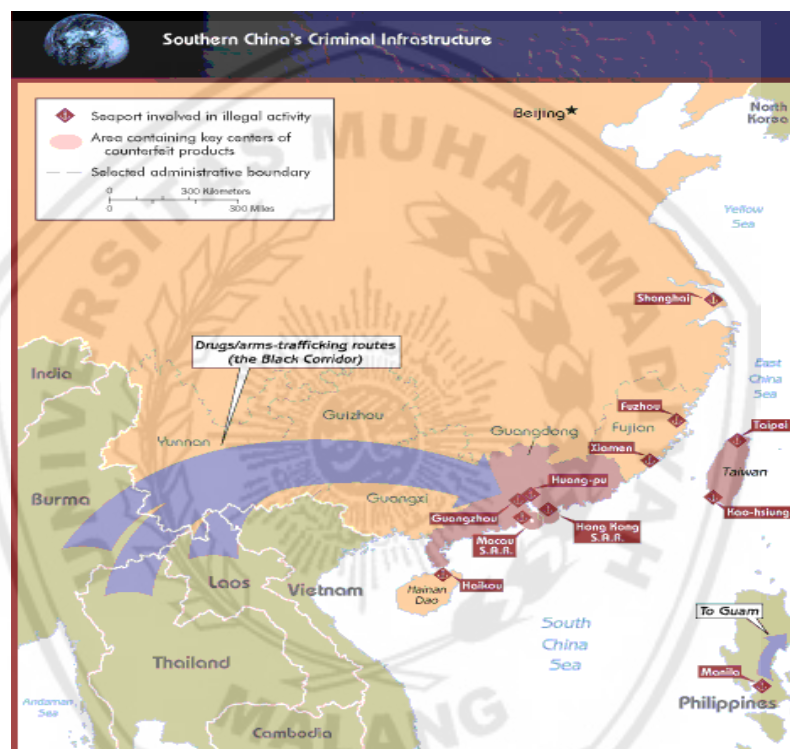
Di perbatasan Provinsi Yunnan, pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa hampir semua narkoba berasal dari *Golden Triangle* di luar Tiongkok⁴¹. Dalam konferensi pers Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Perdagangan terlarang, Tiongkok mengklaim bahwa negara ini menghadapi masalah karena

⁴⁰ Zhao Chengzheng, Liu Zhimin etc , 2004, *Drug Abuse in China*, diakses dalam <http://sci-hub.cc/10.1196/annals.1316.054> ,

⁴¹ *Ibid.*

Tiongkok digunakan sebagai rute transit narkoba internasional⁴², dan sejak 1980an, jumlah pecandu narkoba meningkat di daerah perbatasan, dimana aktivitas jual beli narkoba sangat tinggi di perbatasan tersebut, karena kedekatan geografis dengan *Golden Triangle*..

Gambar 2.1⁴³
Rute Masuknya Narkoba dari Asia Tenggara menuju Tiongkok



Berdasarkan permasalahan yang narkoba yang semakin meningkat pasca kebijakan reformasi ekonomi tersebut, untuk mengendalikan beredarnya obat-obatan terlarang di Tiongkok, pada tahun 1990 pemerintah membentuk *National Narcotics Control Commission* (NNCC), sebuah Komisi Pengawas Narkotika Nasional yang berada di bawah kendali departemen fungsional pemerintah, terdiri

⁴² Kedutaan Besar Tiongkok Untuk Amerika Serikat, *Narcotics Control in China*, diakses dalam <http://www.china-embassy.org/eng/zt/mzpkz/t36387.htm> (25/03/2017, 01.00 WIB)

⁴³ Federation of American Scientists, *International Crime Threat Assessment*, diakses dalam <https://fas.org/irp/threat/754730.gif>

dari 25 Departemen termasuk Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Kesehatan dan Administrasi Umum Bea Cukai⁴⁴. Dibentuknya NNCC ini menunjukkan keseriusan pemerintah Tiongkok dalam menghadapi permasalahan narkoba. Walau begitu, pembentukan NNCC pada tahun 1990 tidak bisa dibilang efektif atau sepenuhnya berhasil jika dilihat dari statistik pertumbuhan penyalahgunaan narkoba di Tiongkok pada gambar 2.1 di atas, yang masih menunjukkan bertambahnya penggunaan narkoba di Tiongkok. Hal ini dikarenakan beberapa pemerintah di provinsi Tiongkok masih mengabaikan atau bahkan menutupi masalah ini.

Pemerintah Provinsi jauh mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada mencegah dampak negatif dari penggunaan narkoba seperti penyebaran HIV/AIDS. Pemerintah provinsi di beberapa bagian Tiongkok lebih tertarik *title* “Provinsi Ekonomi” dibandingkan “Provinsi HIV/AIDS” , padahal dukungan pemerintah di semua tingkat administratif untuk mengurangi dampak buruk sangat dibutuhkan⁴⁵. Ditambah lagi, obat-obatan terlarang yang masuk dari luar Tiongkok yang berada di luar kendali pemerintah Tiongkok seperti dari Myanmar atau Vietnam dengan memakai rute-rute yang sulit dilacak oleh otoritas karena sangat terorganisir menyebabkan Tiongkok bukan hanya harus mengendalikan penyebaran obat-obatan terlarang di dalam negeri saja, melainkan dari luar kawasan Tiongkok.

⁴⁴ Embassy of the People’s Republic of China in the United States of America, *Narcotics Control in China*, diakses dalam <http://www.china-embassy.org/eng/zt/mzpkz/t36387.htm>

⁴⁵ US National Library of Medicine National Institute of Health, Loc. Cit.

2.1.2 Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Dalam kejahatan perdagangan manusia, kejahatan ini menjadi sebuah bisnis gelap bawah tanah yang menguntungkan bagi sindikat kejahatan terorganisir, terutama bagi provinsi-provinsi perbatasan yang rentan karena minimnya tingkat pengawasan pemerintah. Meski pertumbuhan ekonomi Tiongkok terbilang cepat, memiliki kekayaan nasional dan status dunia, Tiongkok memiliki banyak masalah yang berkepanjangan dan serius serta terbukti sulit dipecahkan. Lebih dari satu dekade, pengamat dan ahli Sinologi telah membuktikan bahwa fenomena perdagangan dan penyelundupan manusia di Tiongkok terus berkembang⁴⁶. Penyelundupan dan perdagangan manusia di Tiongkok melibatkan eksploitasi laki-laki, wanita, dan anak-anak berkepanjangan yang telah lama menghantui orang Tionghoa untuk waktu yang sangat lama⁴⁷.

Tiongkok adalah sumber utama, negara transit dan tujuan bagi pria, wanita dan juga anak-anak yang menjadi sasaran perdagangan manusia, khususnya pada bagian kerja paksa dan juga bisnis prostitusi⁴⁸. *The United Nations Inter-Agency on Human Trafficking* melaporkan bahwa terdapat sekitar 600.000 pekerja migran meninggalkan Tiongkok setiap tahun untuk bekerja di luar Tiongkok. Jumlah ini ini berdasarkan laporan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial yang

⁴⁶ Cindy Yik-Yi Chu, *Human Trafficking and Smuggling in China*, Journal of Contemporary China, Vol 20 No 68, (2011), Routledge Publisher. Introduction. Cindy Yik-yo Chu adalah seorang Profesor Sejarah di Hong Kong Baptist University. Profesor Chu sudah mengeluarkan beberapa artikel dalam jurnal yang dipublish di Amerika Serikat, Jerman, Hong Kong dan Korea. Spesialisasi Profesor Chu adalah dalam bidang kajian modern dan kontemporer Tiongkok, sejarah Hong Kong, Hubungan Luar Negeri Tiongkok, hubungan Sino-American dan sejarah katolik.

⁴⁷ Cindy, *Ibid*.

⁴⁸ *United State Department of State, Office To Monitor and Combat Trafficking in Person - China Report : Tier 2 Watch List*, diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258744.htm> , (25/03/2017, 22.00 WIB)

perhitungannya masih belum termasuk para migran yang pergi tanpa dokumen. Terdapat sekitar 90% pekerja migran yang bermigrasi lewat regulasi yang tidak sah serta sumber yang tidak jelas⁴⁹. Jumlah migran perempuan juga meningkat pesat, dan kebanyakan gadis muda berusia 17-25 tahun. Hal ini menandakan bahwa perdagangan lintas batas perempuan meningkat di Tiongkok. Migran yang tidak berdokumen diperdagangkan menuju Tiongkok, yang bersumber dari Vietnam, Myanmar, Korea, dan Rusia. UNIAP (*United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking*) mengatakan bahwa banyak individu telah diperdagangkan dari Tiongkok bagian selatan menuju Myanmar dan bahkan menuju negara seperti Thailand dan Malaysia⁵⁰.

Perdagangan manusia antar negara memiliki tujuan yang varietatif, seperti prostitusi, pernikahan paksa, adopsi ilegal, kerja paksa, dan mengemis⁵¹. Contohnya 8.000 wanita dari Vietnam menikah dengan pria Tiongkok di provinsi Guangxi antara tahun 1989 dan 1999, beberapa diperkenalkan oleh kerabat mereka, namun sebagian besar akibat dari perdagangan manusia. Berdasarkan pernyataan ahli NGOs, pernikahan tersebut terjadi karena kebijakan *One Child Policy* Tiongkok yang dikeluarkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Tiongkok⁵². Namun, kebijakan ini memberikan permasalahan yang baru, jumlah

⁴⁹ Tiantian Zheng, (2013), *China : Sex Work and Human Trafficking (part 1)*, diakses dalam https://www.fairobserver.com/region/asia_pacific/china-sex-work-human-trafficking-part-1/ (29/03/2017, 05.00 WIB). Tiantian Zheng adalah lulusan dari Yale University jurusan antropologi dan memperoleh gelar Ph.D. Sekarang bekerja sebagai profesor antropologi di departemen Sosiologi/antropologi di Universitas Negeri New York, Cortland. Profil lengkap Tiantian Zheng diakses pada : <https://www.fairobserver.com/author/Tiantian%20Zheng/>

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² David Morton, *Trafficking in Foreign Women Rises in China* , diakses dalam <http://www.voanews.com/a/trafficking-in-foreign-women-rises-in-china-97858749/165970.html> (25/03/2017, 05.00 WIB)

laki-laki menjadi lebih banyak dibanding perempuan sehingga para pemuda menjadi sulit menemukan pasangan⁵³. Hal ini yang mendorong kelompok kejahatan untuk mendatangkan perempuan dari negara lain ke Tiongkok untuk dijadikan pengantin.

Sebagai negara transit, kelompok kejahatan akan membawa orang-orang korban *Women Trafficking* ke Tiongkok terlebih dahulu kemudian akan dibawa ke Thailand dan Malaysia yang kemudian akan dieksploitasi sebagai budak dan pekerja prostitusi⁵⁴. Sebagai tempat tujuan, korban dari *human trafficking* kebanyakan merupakan warga negara tetangga Tiongkok seperti Korea Utara, Burma (Myanmar), dan Vietnam sehingga banyak transaksi penjualan manusia yang dilakukan di perbatasan negara⁵⁵ dan kemudian akan diselundupkan menuju provinsi-provinsi tujuan.

Pada tahun 2000, pihak pemerintah Tiongkok melawan perdagangan manusia. Lebih dari 3.500 sindikat perdagangan manusia di tahan⁵⁶. Dalam waktu yang sama, departemen *Provincial Public Security* mengirim lebih dari 100 kelompok kerja ke provinsi-provinsi lain di Tiongkok untuk melawan kejahatan ini. Lebih dari 1800 kasus berhasil dipecahkan⁵⁷. Walaupun pemerintah Tiongkok telah berupaya dalam mengatasi permasalahan ini, namun kasus perdagangan manusia di Tiongkok terus meningkat, akibatnya dari beberapa fenomena yang

⁵³ Devi Ivon Mustari, 2013, *Kebijakan Luar Negeri China Dalam Penanganan Women Trafficking*, Skripsi, Makassar : Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin. Hal. 3

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 4

⁵⁵ Devi Ivon Mustari, 2013, *Kebijakan Luar Negeri China Dalam Penanganan Women Trafficking*, Skripsi, Makassar : Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.

⁵⁶ Yusnarida Eka Nizmi, *Memahami Problematik Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di Cina*, Jurnal Hubungan Internasional, Vo. 5 No 1 (2016). Hal. 73

⁵⁷ *Ibid.*

mengakibatkan kejahatan perdagangan manusia di Tiongkok tersebut, Badan Pengawasan Kejahatan Perdagangan Manusia di Amerika menempatkan Tiongkok dalam Tier 2 Watch List *Trafficking in Person*⁵⁸.

2.2 Transnational Organized Crime di Asia Tenggara

Export-oriented economies di Asia Tenggara memberikan kesempatan bagi kegiatan kriminal internasional dan juga pasar yang menguntungkan bagi bisnis bawah tanah seperti pasar obat-obatan terlarang dan juga perdagangan manusia terutama dari daerah perbatasan menuju tempat yang komersil sehingga membuat aktor *Transnational Organized Crime* di Asia Tenggara berkembang. Negara-negara di Asia Tenggara yang juga tergabung dalam organisasi regional ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) telah terintegrasi secara regional, dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam mempermudah proses aktivitas perekonomian. Namun, kelompok kejahatan teorganisir transnasional juga telah memanfaatkan proses integrasi regional ini untuk memperluas operasinya dalam perdagangan narkoba dan juga manusia di lalu lintas perbatasan dengan memanfaatkan kesenjangan pengawasan hukum nasional negara di Asia

⁵⁸ *Tier Placement Trafficking in Persons* adalah penempatan ranking sebuah negara yang berada dalam pengawasan Amerika Serikat dalam Kejahatan Perdagangan Manusia. *Tier 1* adalah negara yang telah melakukan standar minimum dalam *Trafficking Victims Protection Act's* (TVPA). *Tier 2* adalah negara yang pemerintahnya belum memenuhi standar minimum TVPA tapi berusaha memenuhi standar. *Tier 2 Watch List* adalah negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya memenuhi standar TVPA, namun berupaya secara signifikan untuk memenuhi standar tersebut, namun korban-korban kejahatan perdagangan manusia masih meningkat, dan negara tersebut berjanji untuk berkomitmen dalam menyelesaikan TIP. *Tier 3* adalah negara yang pemerintahnya belum memenuhi standar minimum dan belum melakukan upaya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/258696.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

Tenggara yang tidak memadai⁵⁹. Golden Triangle, perbatasan darat, perbatasan sungai Mekong yang menjadi penghubung antara perairan Asia Tenggara dan Tiongkok, serta kesenjangan ekonomi menjadi faktor penting bagi perkembangan perdagangan narkoba dan manusia di Asia Tenggara.

2.2.1 Kejahatan Perdagangan Narkoba (*Drug Trafficking*)

Kejahatan perdagangan narkoba di Asia Tenggara, tidak bisa dipisahkan dari keberadaan *Golden Triangle*. Segitiga Emas (*Golden Triangle*) adalah kawasan yang terdiri dari Thailand bagian utara, Myanmar bagian Timur dan Laos bagian barat⁶⁰, yang juga bersinggungan dengan daerah pegunungan di perbatasan Tiongkok dan dikenal sebagai salah satu kawasan budidaya opium dan penghasil utama heroin utama di dunia.⁶¹ Penyelundupan obat-obatan terlarang ini kebanyakan didistribusikan dari Segitiga Emas ke Propinsi Yunnan Tiongkok dan kemudian lewat jalur darat ke Guangdong, Hong Kong serta Makau.⁶² Kawasan Segitiga Emas yang berdekatan dengan Tiongkok ini menghasilkan opium, heroin dan amphetamine terbesar dan kemudian disebarkan ke seluruh negara-negara di dunia.⁶³ Segitiga Emas, yang juga menghubungkan jalur ke Tiongkok selatan

⁵⁹ Jeremy Douglas, *Organized Crime threatening the development of southeast Asia*, diakses dalam <http://www.eastasiaforum.org/2017/08/25/organised-crime-threatening-the-development-of-southeast-asia/> (25/03/2017, 05.00 WIB)

⁶⁰ *Ibid.* Hal. 3

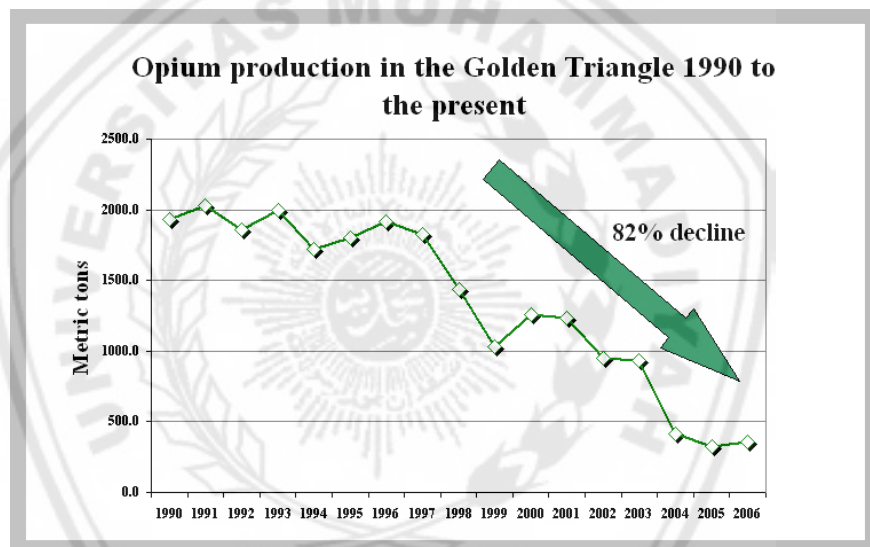
⁶¹ Ko-lin Chin and Sheldon X. Zhang, (2007), *The Chinese Connection: Cross-border Drug Trafficking between Myanmar and China*, A Final Report to The United States Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, United State. Hal 8

⁶² Ralf Emmers, *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy*, IDSS (Institute of Defence and Strategic Studies), Discussion Papers No. 2, Mei 2003, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espana. Hal.4.

⁶³ Ralf Emmers, *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy*, IDSS (Institute of Defence and Strategic Studies), Discussion Papers No. 2, Mei 2003, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espana. Hal.4

yaitu Provinsi Yunnan telah menciptakan peluang besar dalam distribusi opium⁶⁴. Kerjasama ini ternyata membuat produksi opium di Myanmar meningkat dari 161,013 hektar pada tahun 1991 menjadi 165.000 pada tahun 1993.⁶⁵ Produksi opium tersebut kemudian didistribusikan ke Hong Kong dan Bangkok, yang kemudian kota-kota ini menjadi pusat dari perdagangan narkoba oleh „para pedagang“.⁶⁶

Grafik 2.2⁶⁷
Grafik Budidaya Opium di Kawasan Segitiga Emas



⁶⁴ Dalam bukunya Fenton Bresler (1980), *The Chinese Mafia*, terdapat opini penulis yang mengatakan terdapat pandangan tak resmi tentang kawasan Segitiga Emas. Segitiga Emas sebenarnya adalah Segiempat Emas, sisinya yang ke empat terdiri atas pegunungan sebelah selatan provinsi Yunnan di daerah RRT, satu-satunya tempat di negara tersebut dimana pemerintah Tiongkok belum mampu melarang penanaman opium secara sukses. Hasil wawancara Fenton Bresler kepada Biro Narkotika Kepolisian Hongkong yaitu Inspektur Leonard Hill mengatakan bahwa Provinsi Yunnan menghasilkan opium yang dipasarkan melalui Segitiga Emas dan turun ke Bangkok kemudian mengikuti pola ekspor pada umumnya ketujuan manapun.

⁶⁵ Alan Dupont, *Transnational Crime, Drugs, and Security in East Asia*, Asian Survey, Vol. 39 No.3, (May-June 1999), University of California Press. Hal 443

⁶⁶ Phil Williams and C. Florez, (1994), *Transnational Criminal Organizations and Drug Trafficking*, Bulletin on Narcotics 96:2 hal. 16 dalam Alan Dupont, *Transnational Crime, Drugs, and Security in East Asia*, Asian Survey, Vol. 39 No.3, (May-June 1999), University of California Press hal. 449

⁶⁷ UNODC, *Address to MoU Ministerial Meeting*, dikases dalam https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/speech_2007_05_25.html (25/03/2017, 05.00 WIB)

Segitiga Emas berperan penting bagi Myanmar sebagai penghasil opium terbesar di dunia, negara Laos sebagai penghasil opium terbesar kedua setelah Myanmar dan Thailand yang mendominasi penjualan ekstasi, sabu-sabu dan narkoba jenis lainnya adalah bukti betapa besarnya kekuatan narkoba di daerah ini⁶⁸. Produksi narkoba di Segitiga Emas termasuk dalam kategori narkoba dan *potential addictive* yang terbuat dari tumbuhan opium poppy dan *papaver somniferum* yang kemudian diproses menjadi heroin. Wilayah Segitiga Emas ini memberikan sumbangan pada industri heroin yang bernilai US\$ 160 Milyar pertahun⁶⁹.

Myanmar merupakan poin penting dalam Segitiga Emas karena Myanmar bertugas sebagai distributor opium ke seluruh dunia. Myanmar bukan lagi sebagai negara transit dari narkoba namun sebagai negara pembuat narkoba nomor satu. Selama ratusan tahun, provinsi Shan dari Myanmar yang sebelah timurnya berbatasan dengan Tiongkok, sebelah baratnya berbatasan dengan Thailand dimana kota Maesai berada menjadi tempat ladang opium yang paling utama. Selain tanah dan iklimnya cocok, lokasinya juga strategis karena terisolir. Myanmar memiliki perbatasan yang panjang, perbukitan dan pegunungan yang tidak terjaga sehingga pemerintah kesulitan menetapkan kontrol dalam pengawasan aktivitas ilegal. Faktor lain seperti etnis-etnis pemberontak yang ada di Myanmar menghambat kontrol pemerintah di beberapa daerah, sehingga daerah-

⁶⁸ Novia Azmi, *Pengaruh Globalisasi terhadap Peredaran Narkoba di Asia Tenggara tahun 2011-2015*. Diakses dalam

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/13896/13457>

⁶⁹ Zarina Othman, 2004, *Myanmar Illicit Drugs Trafficking and Security Implication*, Hal. 33 dalam Novia Azmi, *Pengaruh Globalisasi terhadap Peredaran Narkoba di Asia Tenggara tahun 2011-2015*.

daerah yang dikuasai kelompok pemberontak berada dalam jangkauan hukum Myanmar. Kelompok-kelompok ini seperti *United Wa State Army (UWSA)*, *Shan State Army South (SSAS)*, *Shan State Army North (SSA-N)*, *Demokrat Karen Buddhist Army (DBKA)* , etnis kelompok kriminal Tiongkok (termasuk kelompok Triad), dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya yang berhubungan dengan sejarah dan pemberontakan etnis. Kelompok-kelompok ini merupakan ancaman terhadap Myanmar, dan mereka beroperasi secara bebas sepanjang perbatasan Tiongkok dan Thailand⁷⁰.

Dalam kejahatan perdagangan narkoba di Asia Tenggara, Myanmar merupakan salah satu produsen utama. Sebagai salah satu wilayah dari Segitiga Emas, Myanmar menyumbang sekitar 90% Opium di wilayah Shan State , dan sekitar tahun 1990an Myanmar memperoleh keuntungan dari perdagangan narkoba dari semua perdagangan ilegal⁷¹. Para etnis-etnis perbatasan yang kesulitan ekonomi, memanfaatkan budidaya bunga poppy (opium) yang tumbuh di daerah perbatasan sebagai mata pencaharian mereka, sehingga menarik perhatian kelompok kejahatan terorganisir dan pemberontak-pemberontak Myanmar memanfaatkan situasi ini.

Permintaan yang besar akan narkoba berasal dari Tiongkok, setelah itu Thailand. Golden Triangle yang menjadi tempat pertumbuhan opium juga terdapat laboratorium khusus untuk mengolah opium menjadi obat-obatan sintetis⁷². Obat-

⁷⁰ Liana Sun Wyler, 2008, *Burma and Transnational Crime*, A Congress Research Service Report . Hal. 5

⁷¹ Jeffrey Hays, *Loc. Cit*

⁷² David Eimer, *It's happy hour for the heroin traffickers of the Golden Triangle*, diakses dalam <http://www.scmp.com/news/asia/article/1317745/its-happy-hour-heroin-traffickers-golden-triangle> (25/03/2017, 05.00 WIB)

obatan ini kemudian akan diselundupkan ke Provinsi perbatasan Myanmar dan Tiongkok, yaitu Yunnan yang kemudian diteruskan ke Shanghai, Hong Kong dan kota-kota pesisir dimana obat-obatan ini dimuat ke salah satu dari ribuan kapal yang berangkat ke Amerika Utara, dan Eropa⁷³.

Republik Demokratik Rakyat Laos (The Lao PDR) secara geografis berada pada pusat wilayah Greater Mekong dan berbatasan dengan Kamboja, Tiongkok, Myanmar, Thailand dan Vietnam⁷⁴. Kedekatan perbatasan ini menjadikannya titik dari mana sindikat kriminal dapat mentransformasikan komoditas terlarang melintasi wilayah Mekong dan secara global melalui sistem perdagangan Tiongkok yang sah. Dalam kejahatan perdagangan narkoba, sejak pertengahan tahun 90-an Laos telah menjadi pusat perdagangan narkoba Amfetamin Tipe Stimulan (ATS), heroin dan obat-obatan terlarang lainnya Laos yang merupakan bagian dari Segitiga Emas adalah penghasil opium terlarang terbesar ketiga di seluruh dunia dan merupakan negara dengan tingkat pecandu tertinggi kedua di dunia. Opium diproduksi dan dikonsumsi di daerah pegunungan oleh petani dan etnis-etnis perbatasan⁷⁵.

Di Laos, karena situasi ekonomi yang sulit, budidaya opium menjadi alasan masyarakat Laos untuk meningkatkan ekonomi mereka. Survei opium tahun 2003 memperkirakan penanaman opium sekitar 12.000 hektar, dengan produksi opium 120 ton pada produksi 10 kg / ha. Pada tahun 2003, Pemerintah

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Jon Koyne, 2015, Ivory and transnational crime: big issues in Laos, diakses dalam <https://www.aspistrategist.org.au/ivory-and-transnational-crime-big-issues-in-laos/>

⁷⁵ United Nations Office on Drug and Crime, 2003, *Lao Peoples Democratic Republic*, hal. 2

melaporkan 30.000 pecandu opium⁷⁶. Tidak adanya pengawasan dari pemerintah, kurangnya polisi perbatasan serta pos-pos pengawasan perbatasan menjadikan rute-rute perbatasan antara Laos dengan negara Thailand, Myanmar, Vietnam, Tiongkok dan Kamboja menjadi rute yang sering digunakan. Laos sebagai sumber perdagangan narkoba biasanya menuju Thailand, Myanmar, Vietnam dan Tiongkok⁷⁷.

Negara Thailand, kejahatan perdagangan narkoba adalah isu kejahatan yang serius. Thailand adalah salah satu negara yang menjadi tempat produksi, perdagangan dan pengguna obat-obatan terlarang. Jenis narkoba yang sering digunakan adalah methamphetamine, heroin, ganja, opium, ekstasi dan kokain⁷⁸. Methamphetamine merupakan jenis narkoba yang paling banyak tersebar, karena lebih menguntungkan, dan mudah diselundupkan. Methamphetamine banyak digunakan oleh murid-murid Thailand untuk begadang sepanjang malam, dan juga pengemudi truk⁷⁹. Perbatasan antara Thailand dan Myanmar menjadi tempat bagi para pedagang narkoba mendapatkan obat-obatan tersebut, sedangkan bahan kimia untuk mengolah methamphetamine diselundupkan dari perbatasan Tiongkok Selatan menuju perbatasan Thailand-Myanmar⁸⁰. Sebagai negara Transit, Thailand merupakan titik transit penting bagi obat-obatan terlarang yang akan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Jon Koyné, Loc. Cit*

⁷⁸ Sittipong Tanyapongruch, *Transnational Organized Crime in Thailand*, diakses dalam http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No59/No59_40PA_Tanyapongruch.pdf (25/03/2017, 05.00 WIB)

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

diselundupkan menuju Amerika Utara. Rute⁸¹ yang dilalui adalah perbatasan Thailand-Myanmar melalui jalur darat atau jalur sungai, dan diselundupkan di dalam kendaraan. Sindikat kejahatan terorganisir yang dominan di Thailand dalam perdagangan ini berasal dari Tiongkok.

Pada tahun 2001, Badan Intelijen Thailand memperkirakan 600-700 juta methamphetamine siap diselundupkan dari Myanmar menuju Thailand. Tentara patroli Perbatasan Thailand pun bentrok dengan penyelundup, dan sekitar 2,6 juta pil disita⁸². Karena banyaknya penyelundup di bagian perbatasan, situasi baku tembak antara polisi dan sindikat kriminal sering terjadi di perbatasan Thailand dan Myanmar.

Selain kawasan Segitiga Emas, negara-negara di Asia Tenggara lainnya mengalami permasalahan serupa. Hal ini dikarenakan negara-negara Asia Tenggara yang terintegrasi membuat peredaran narkoba juga semakin luas. Contohnya adalah negara Vietnam, merupakan negara yang berbatasan dengan negara Laos, Kamboja dan juga Tiongkok, menjadi pusat transit utama untuk opium dari Segitiga Emas menuju pasar internasional. Beberapa sindikat kejahatan terorganisir menggunakan Sungai Mekong sebagai rute, beberapa menggunakan rute pegunungan, bahkan ada yang menggunakan jalan raya utama menuju lokasi tujuan kemudian akan dibawa ke pasar lokal atau pelabuhan untuk

⁸¹ Center for 21st Century Security and Intelligence Latin America Initiative, *Windle Thailand Final*, diakses dalam <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/WindleThailand-final.pdf> (25/03/2017, 05.00 WIB)

⁸² Sittipong, Loc. Cit

didistribusikan di pasar internasional⁸³. Wilayah pegunungan bagian barat Vietnam dijadikan pusat distribusi narkoba, sementara wilayah perbatasan Tiongkok diidentifikasi sebagai rute lainnya. Selain itu, tren dari heroin dan juga obat-obatan ATS meningkat, karena permintaan dari *drug dealer* yang ada di Vietnam yaitu King Ping. Laporan dari Reuters mengatakan bahwa kejahatan terkait narkoba meningkat 10% dari 2001 ke 2002⁸⁴.

Disamping Vietnam, negara Filipina dan Kamboja juga menjadi komponen penting dalam hal distribusi narkoba ke pasar internasional, karena tujuan distribusi yang berbeda membuat narkoba tersebut harus melewati tempat atau negara transit untuk memberikan supply terhadap pasar domestika dan pasar intrenasional. Situasi kejahatan transnasional di Filipina yang menjadi perhatian pemerintah adalah perdagangan narkoba. Tahun 1992, tercatat 20.000 pengguna narkoba di Filipina. Negara ini menjadi negara sumber, transit, dan juga pengeksport obat-obatan terlarang. Kurangnya kontrol pemerintah di pelabuhan, bandara, dan pantai yang dapat ditembus menjadikan Filipina sebagai titik keluar masuk untuk penyelundupan dan area transir alternatif bagi sindikat perdagangan narkoba internasional⁸⁵. Dalam dokumen Konferensi Internasional PBB di Jepang, Filipina memiliki permasalahan dengan kelompok organisasi kriminal lintas batas yang ada di Filipina. Yang pertama adalah organisasi kriminal Tiongkok Triad, yang bertanggung jawab atas penyelundupan shabu ke Filipina. Yang kedua

⁸³ Jeffrey Hays, 2014, *Illegal Drugs in Vietnam*, diakses dalam http://factsanddetails.com/southeast-asia/Vietnam/sub5_9c/entry-3414.html (25/03/2017, 05.00 WIB)

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Alberto Rama Olario, CURRENT SITUATION OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN THE PHILIPPINES, diakses dalam http://unafei.or.jp/english/pdf/RS_No54/No54_13PA_Olario.pdf (25/03/2017, 05.00 WIB)

adalah jaringan kelompok Nigeria, yang bertanggung jawab dalam menyelundupkan heroin dari Segitiga Emas menuju Amerika dan Eropa, dengan menggunakan Filipina sebagai negara transit. Yang ketiga adalah Sindikat Narkoba Australia dan Yakuza Jepang, yang bertanggung jawab dalam menyelundupkan kanamis dari Filipina menuju New Zealand dan Jepang⁸⁶. Dalam penggunaan obat-obatan terlarang jenis shabu banyak ditemukan di Filipina. Shabu yang diimpor secara ilegal dari Hong Kong dan Taipei. Pada tahun 1995, PNP Narcotics Group menyita lebih dari 200 kg shabu, dan pada tahun 1996 kelompok tersebut menyita 300 kg shabu seharga 600 juta peso, sebagai upaya dalam melawan sindikat Triad yang berbasis di Filipina⁸⁷.

Negara Kamboja telah menjadi negara transit utama untuk perdagangan narkoba. Jumlah pengguna obat terlarang - terutama ATS - telah meningkat dengan tajam. Kamboja telah menjadi negara tujuan dan transit untuk perdagangan narkoba. Jumlah pengguna obat terlarang - terutama stimulan jenis (ATS) - telah tumbuh dengan tajam.. Obat-obatan terlarang tersebut berasal dari Golden Triangle Myanmar, tiba melalui Thailand dan Laos melalui jalur darat ataupun melalui sungai dengan menggunakan kapal kecil di Thailand⁸⁸.

Dalam kejahatan perdagangan narkoba, Indonesia menjadi tujuan bagi perdagangan narkoba. Amphetamine Type Stimulants (ATS) telah semakin tersedia dan banyak digunakan Pada paruh kedua tahun 1990an, terjadi

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Philippines Cracks Down on Drug Trafficking*, diakses dalam <https://www.voanews.com/a/a-13-a-2003-06-19-8-philippines/390100.html> (25/03/2017, 05.00 WIB)

⁸⁸ Nate Tayer, 1995, Cambodia: Asia's New Narco-State? Medellin on the Mekong, diakses dalam <http://www.nate-thayer.com/cambodia-asias-new-narco-state-medellin-on-the-mekong/> (25/03/2017, 05.00 WIB)

peningkatan penggunaan heroin dan ATS yang cukup besar - terutama suntikannya - yang memicu penyebaran HIV secara cepat. Kelompok kriminal dalam upaya memenuhi permintaan saat ini atau mungkin dari populasi anak muda yang besar dan pasar obat-obatan yang sangat besar.

Kelompok-kelompok ini sangat terorganisir dan sering beroperasi di beberapa negara, memanfaatkan kerentanan berbagai negara, memindahkan barang dengan mudah melintasi perbatasan darat, dan dalam beberapa kasus melalui pelabuhan. Metamfetamin telah diproduksi dalam skala besar di Indonesia oleh kelompok kejahatan terorganisir, namun sering diperdagangkan ke Indonesia dari Tiongkok, Filipina, dan Iran⁸⁹. Sebagian besar metamfetamin kristal yang disita di Indonesia berasal dari Tiongkok termasuk Hong Kong), Filipina dan Thailand. melalui titik masuk Jakarta, Batam, Surabaya dan Denpasar. Metamfetamin kristalin yang diperdagangkan dari Malaysia juga ditemukan di Aceh dan Medan di pulau Sumatra⁹⁰.

Berdekatan dengan Indonesia, Penang Malaysia juga sebagai titik transit untuk obat-obatan terlarang dari Segitiga Emas, dan biasanya berasal dari Thailand. Selain itu, sebagai rute transit, tujuannya adalah Tiongkok Taipei dan setelah mencapai Tiongkok Taipei, akan diekspor kembali ke negara lain⁹¹. Metode yang digunakan adalah dengan memanfaatkan perbatasan Malaysia dan Thailand. Titik pemeriksaan perbatasan Thailand dan Malaysia pada saat jam

⁸⁹ UNODC: *Indonesia is a major drug trafficking*, diakses dalam <http://www.dw.com/en/unodc-indonesia-is-a-major-drug-trafficking-hub/a-18231494> (25/03/2017, 05.00 WIB)

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Penang as transit point for drug smuggling and international syndicates*, diakses dalam <http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/12/25/penang-transit-point-for-drug-smuggling-international-syndicates/> (25/03/2017, 05.00 WIB)

sibuk dijadikan waktu yang tepat bagi penyelundupan narkoba yang biasanya disimpan di brankas tersembunyi di dalam mobil⁹². Pemeriksaan keamanan pada setiap kendaraan pada saat jam sibuk membuat petugas perbatasan tidak bisa mengecek satu per satu kendaraan. Metode lain seperti menyamarkan obat-obatan ini ke dalam buah-buahan dan juga permen menjadi metode efektif yang dilakukan oleh sindikat kejahatan⁹³.

Negara Brunei Darussalam merupakan negara transit yang dimanfaatkan bagi sindikat kejahatan internasional menuju Australia dan Tiongkok. Narkoba tipe ATS menjadi yang dominan dalam kasus ini.⁹⁴ Walaupun Brunei merupakan rute transit, namun kasus kejahatan narkoba yang terjadi tidak terlalu parah di bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, karena Brunei bukan negara penghasil atau tujuan yang menguntungkan, karena peraturan yang sangat ketat dari pemerintah Brunei, salah satunya hukuman mati ketika kedapatan membawa lebih dari 50 gram amfetamine⁹⁵. Singapura digunakan sebagai negara transit dan juga distributor bagi perdagangan narkoba yang disalurkan melalui Segitiga Emas. Singapura memiliki peraturan yang sangat ketat mengenai

⁹² Sahana Ismail and Norhaya Jaafar, *Drug Smuggling in Malaysia-Our Recent Cases Files*, diakses dalam <http://forensics.org.my/pdf/fssmVol.6No.1/Article%2006.pdf> (25/03/2017, 05.00 WIB)

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Brunei Darussalam Executive Summary of The Country Report on Drug Control*, diakses dalam http://www.na.gov.la/docs/AIPA/aifocom11/Doc_for_AIFOCOM/EXECUTIVE%20SUMMARY/SUMMARY%20OF%20THE%20COUNTRY%20by%20Brunei.pdf (25/03/2017, 05.00 WIB)

⁹⁵ Brunei Drug Law, diakses dalam <http://www.narcotics.gov.bn/SitePages/Drug%20Laws.aspx> (25/03/2017, 05.00 WIB)

kejahatan ini, sehingga kasus masif yang melibatkan kejahatan perdagangan narkoba jarang terjadi⁹⁶.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat jenis-jenis peredaran narkotika di negara-negara Asia Tenggara, dan tiap negara memiliki jenis narkotika yang menjadi tren penjualan. Salah satu badan dari PBB yang menangani kejahatan perdagangan narkoba yaitu UNODC (*United Nations on Drug Crime*) memberikan informasi mengenai penyebaran jenis-jenis narkotika yang ada di Asia Tenggara, beserta jenis-jenis narkotika yang ditemukan.

Tabel 2.1⁹⁷
Tabel Penyitaan Peredaran Jenis-jenis Narkoba di Asia Tenggara (2000)

<i>Seizures</i>	<i>Brunei</i>	<i>Cambodia</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Lao PDR</i>	<i>Malaysia</i>	<i>Myanmar</i>	<i>Philippines</i>	<i>Singapore</i>	<i>Thailand</i>	<i>Viet Nam</i>
Opium – raw & prepared			0.034 kg	151 kg	0.71 kg	1,773.652 kg		4.504 kg	1,591.991 kg	567 kg
Heroin	0.001 kg		22.655 kg	29 kg	109.17 kg	158.921 kg 273.193 kg (1999)	0.022 kg (1999)	52.083 kg	384 kg	60 kg
Cannabis herb	0.054 kg		6,332.908 kg	18,734,000 kg	1,885.45 kg	601.508 kg	1,429.474 kg	23.903 kg	10,320 kg	2,200 kg
ATS	1.648 kg	50,565 units	88.163 kg	1,957,929 units	208.1 kg	6.398 kg 26,759,772 units	989.76 kg 30 lt.	0.759 kg 24,723 units	7,557 kg 84,000,000 units	30,876 units

Data di atas berdasarkan laporan dari badan penegakan hukum tiap negara di Asia Tenggara yang diolah oleh *United Nations On Drug and Crimes* (UNODC). Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa penyitaan opium dan heroin masih signifikan di Myanmar dan di Thailand, menunjukkan peningkatan tinggi

⁹⁶ Keeping Singapore Drug Free, diakses dalam https://www.mha.gov.sg/Newsroom/others/PublishingImages/Pages/Keeping-Singapore-Drug-Free/MHA_DrugBooklet.pdf (25/03/2017, 05.00 WIB)

⁹⁷ UNODC, *Drug Free ASEAN 2015*, diakses dalam https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015.pdf (25/03/2017, 05.00 WIB)

untuk jenis ATS, dengan lebih dari 26 juta laporan penyitaan oleh Myanmar dan 84 juta oleh Thailand⁹⁸. Penyitaan ganja juga besar pada tahun 2000 yang menunjukkan peningkatan. Secara keseluruhan, tabel di atas menunjukkan peningkatan penyebaran ATS di beberapa kawasan di Asia Tenggara.

Berdasarkan situasi kejahatan perdagangan narkoba yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara, sebagai respon atas fenomena ini, maka di tiap negara di Asia Tenggara sama halnya seperti Tiongkok, memiliki badan penegak hukum khusus yang bergerak dalam pengawasan kejahatan ini. Pada level nasional, biasanya badan ini berada di bawah Kementerian Kehakiman, Kementerian Keamanan Publik, dan beberapa badan yang bertempat langsung di bawah kantor Presiden. Dalam kebanyakan kasus, badan ini memiliki peran koordinasi dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pengobatan yang dilakukan sejalan dengan strategi nasional. UNODC kemudian mendata badan-badan penegak hukum mengenai pengendalian narkoba di negara-negara Asia Tenggara seperti berikut.

⁹⁸ *Ibid.*

Gambar 2.2⁹⁹
List Badan Penegak Hukum Mengenai Permasalahan Narkoba di Asia Tenggara

Box 1.
Narcotics Control Bureau (NCB), Brunei Darussalam
National Authority for Combating Drugs (NACD), Cambodia
National Narcotics Board (NNB), Indonesia
National Commission for Drug Control and Supervision (LCDC), Lao PDR
National Anti-Drugs Agency (NADA), Malaysia
Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC), Myanmar
Dangerous Drugs Board (DDB), Philippines
Central Narcotics Bureau (CNB), Singapore
Office of the Narcotics Control Board (ONCB), Thailand
Standing Office on Drug Control (SODC), Viet Nam

2.2.2 Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Kasus kejahatan perdagangan manusia di Asia Tenggara tidak lain dikaitkan dengan faktor ketidakseimbangan ekonomi yang terjadi, dan juga pengawasan hukum yang tidak ketat membuat kejahatan perdagangan manusia menjadi berkembang di Asia Tenggara. Nilai keuntungan dari kejahatan ini menjadi pemicu kelompok kriminal lintas batas untuk bekerja sama dengan kelompok kriminal lainnya agar menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.

Dalam kasus perdagangan manusia, ketika Pasca 1980an ,Vietnam menjadi negara sumber bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang menjadi sasaran prostitusi dan kerja paksa di dalam negeri dan luar negeri. Laki-laki dan perempuan Vietnam bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja secara independen atau melalui perusahaan rekrutmen ekspor tenaga kerja milik negara, swasta, atau

⁹⁹ *Ibid.*

gabungan. Beberapa kemudian menjadi sasaran kerja paksa di sektor konstruksi, perikanan, pertanian, pertambangan, penebangan kayu, dan manufaktur. Perempuan dan anak-anak Vietnam menjadi sasaran perdagangan seks di luar negeri, banyak yang disesatkan oleh kesempatan kerja palsu dan dijual ke operator bordil di perbatasan Tiongkok, Kamboja, dan Laos, sementara yang lainnya menjadi sasaran perdagangan seks di Thailand dan Malaysia¹⁰⁰. Hutang, penyitaan paspor dan ancaman deportasi adalah taktik yang biasa digunakan untuk memaksa korban Vietnam menjadi budak. Korban sering direkrut oleh kerabat atau kenalan, sering dengan pengetahuan, persetujuan, atau desakan anggota keluarga dekat.

Vietnam memiliki undang-undang yang melarang eksploitasi seksual dan perdagangan perempuan dan anak-anak. Pemerintah menyelidiki, menahan, dan menghukum sindikat kriminal dalam perdagangan manusia. Namun, pemerintah Vietnam masih kurang mampu dalam mengevaluasi statistik dalam pengumpulan data kasus kejahatan perdagangan manusia, sehingga tidak bisa dievaluasi. Tahun 2003, Vietnam masuk dalam kategori *Tier 2 Trafficking in Person*¹⁰¹.

Pasca kebijakan *Doi Moi* tahun 1986, Vietnam mengalami perubahan ekonomi dan juga perubahan sosial yang luar biasa. Munculnya ekonomi pasar dan terbukanya masyarakat global, dikombinasikan dengan migrasi dalam negeri, menciptakan masalah baru bagi Vietnam. Efek kebijakan ekonomi terbuka Vietnam ini tidak merata, sehingga muncul ketidakseimbangan ekonomi dan menghasilkan kesenjangan antara masyarakat yang miskin dan kaya. Akses

¹⁰⁰ U.S. Department of State, *Trafficking in Person*, diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/105389.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

¹⁰¹ *Ibid.*

pendidikan, kesehatan, informasi dan komunikasi pun tidak merata, terutama di daerah perbatasan Vietnam, sangat berbeda dengan daerah ibu kota. Salah satu masalah terbesar adalah di awal tahun 1990-an, yaitu penyebaran virus HIV dan AIDS, akibat dari kasus kejahatan perdagangan narkoba dan juga manusia, dimulai dari perbatasan utara antara Tiongkok dan juga Vietnam.¹⁰²

Kejahatan Transnasional terorganisir di Myanmar sangat berkembang pesat yang melakukan perdagangan ilegal. Para organisasi kriminal memanfaatkan rute jalur perdagangan dimana korupsi dan pengawasan hukum yang tidak ketat sebagai jalur perdagangan ilegal. Dalam kasus perdagangan manusia, Myanmar merupakan negara sumber bagi perempuan, pria dan anak-anak untuk diperdagangkan dengan tujuan kerja paksa dan prostitusi. Orang-orang di Myanmar diperdagangkan ke Thailand, Tiongkok, Korea Selatan dan Makau untuk dieksploitasi, kerja paksa¹⁰³. Anak-anak Myanmar dipaksa untuk menjadi pengemis, atau bekerja di pertokoan, pertanian dan industri skala kecil. Sebagai negara transit, perdagangan manusia yang melewati Myanmar berasal dari Bangladesh ke Malaysia, dan Tiongkok ke Thailand¹⁰⁴.

Meski angka migrasi berbeda, satu Perkiraan titik tengah menunjukkan bahwa dari satu juta imigran gelap di Thailand, 75% berasal dari Myanmar¹⁰⁵.

¹⁰² Duncan McCargo (Editor), 2004, *Rethinking Vietnam*, London : Routledge Curzon. Hal. 153

¹⁰³ Burma Trafficking in person, diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/21275.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

¹⁰⁴ UN Inter-Agency Project on Human Trafficking / Myanmar Office of United Nations Resident Coordinator in Myanmar, diakses dalam http://asean.org/storage/2016/08/MY3_Strategic-Info-Res-Netw-HT-Data-Sheet-2009.pdf (25/03/2017, 05.00 WIB)

¹⁰⁵ Archavanitkul, Kritaya. "Trafficking in Children for Labor Exploitation including Child Prostitution in the Mekong Sub-region." Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1998, p. 16. Diakses dalam http://asean.org/storage/2016/08/MY3_Strategic-Info-Res-Netw-HT-Data-Sheet-2009.pdf (25/03/2017, 05.00 WIB)

Sedikit yang diketahui tentang migrasi lintas batas keTiongkok, bagaimanapun, pada tahun 2001 Save the Children memperkirakan bahwa 140.000 orang berasal Myanmar telah pindah untuk tinggal di sepanjang atau melintasi perbatasan Tiongkok¹⁰⁶. Perdagangan manusia biasanya melalui perbatasan-perbatasan Myanmar seperti dari Kengtung dan Tachileik ke Mae Sai, Thailand; dari Myawaddy ke Mae Sot, Thailand; dan dari Kawthaung ke Ranong, Thailand, dan kadang-kadang dari titik-titik ini sampai ke Malaysia. Perempuan dari Negara Bagian Kachin dan Negara Bagian Shan Utara diperdagangkan ke Propinsi Yunnan, Tiongkok, melalui Ruili¹⁰⁷. Untuk Malaysia dan Thailand, perempuan dan laki-laki diperdagangkan untuk eksploitasi tenaga kerja; perempuan diperdagangkan juga untuk eksploitasi seksual dan pekerjaan rumah tangga. Anak-anak diperdagangkan ke dalam kerja paksa sebagai penjaja jalanan dan pengemis. Untuk Tiongkok, perempuan dibawa ke kota-kota perbatasan di Propinsi Yunnan dan sampai ke Tiongkok bagian Timur, di mana mereka dipaksa untuk pergi menikahi pria Tiongkok atau bekerja di industri prostitusi¹⁰⁸. Pada tahun 2003, Myanmar berada dalam posisi *Tier 3*, karena Pemerintah Myanmar tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk melakukannya. Militer terlibat langsung dalam perdagangan kerja paksa¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Therese M. Caouette, 2001, "Small Dreams Beyond Reach, Save the Children. Hal. 2

¹⁰⁷ Diakses dalam http://asean.org/storage/2016/08/MY3_Strategic-Info-Res-Netw-HT-Data-Sheet-2009.pdf (25/03/2017, 05.00 WIB)

¹⁰⁸ Devi Ivon Mustari, *Op. Cit.* Hal. 42

¹⁰⁹ *Burma Trafficking in Person*, diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/21275.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

Laos merupakan negara sumber bagi perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual komersial dan eksploitasi tenaga kerja sebagai pekerja rumah tangga atau pabrik di Thailand¹¹⁰. Laki-laki Laos, perempuan, dan anak-anak bermigrasi ke negara-negara tetangga untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik namun mengalami kondisi kerja paksa atau kerja paksa atau industri prostitusi setelah tiba.

Beberapa laki-laki Laos yang bermigrasi dengan sukarela ke Thailand mengalami kerja paksa di industri penangkapan ikan dan konstruksi Thailand. Pada tingkat yang lebih rendah, Laos adalah negara transit bagi perempuan Vietnam, Tiongkok dan Myanmar menuju Thailand. Potensi Laos sebagai negara transit terus meningkat dengan pembangunan jalan raya baru yang menghubungkan Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan Kamboja melalui Laos¹¹¹. Perdagangan internal juga menjadi masalah yang mempengaruhi perempuan dan anak perempuan muda yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual komersial di daerah perkotaan. Laos berada dalam kategori Tier 2 tahun 2003, karena Pemerintah Laos belum sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia, namun, berusaha secara signifikan untuk melakukannya meskipun sumber daya sangat terbatas. Pemerintah mengakui perdagangan manusia sebagai masalah dan mendukung upaya anti-perdagangan manusia, terutama dengan bekerja sama dengan LSM yang

¹¹⁰ Laos Trafficking in person, diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/105388.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

¹¹¹ *Ibid.*

beroperasi di wilayahnya dan memberikan beberapa dukungan baik seperti ruang kantor dan waktu udara untuk pengumuman layanan masyarakat¹¹².

Thailand adalah negara sumber, transit dan tujuan bagi orang-orang yang diperdagangkan dalam bisnis prostitusi dan kerja paksa. Ketidakseimbangan ekonomi di kawasan ini membantu mendorong migrasi ilegal yang signifikan ke Thailand dari negara tetangganya, dan menjadikan para sindikat perdagangan manusia menjadikan korban terikat dalam eksploitasi tenaga kerja, terutama perempuan dan anak-anak, yang dijadikan pelaku prostitusi. Korban perdagangan internasional terutama berasal dari Myanmar, Laos, Kamboja, dan Tiongkok. Banyak korban berasal dari suku etnis tanpa tempat tinggal di Thailand Utara dan daerah sekitarnya¹¹³. Pariwisata seks yang meluas di Thailand mendorong perdagangan untuk prostitusi. Korban Thailand - dan yang lainnya kadang-kadang transit melalui Thailand - diperdagangkan ke Australia, Afrika Selatan, Jepang, Taiwan, Eropa dan Amerika Utara terutama untuk eksploitasi seksual banyak yang pergi dengan sukarela dan kemudian menjadi korban dari para pedagang¹¹⁴.

Dalam mengatasi isu ini, Pemerintah Thailand belum sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia, namun telah membuat usaha yang signifikan untuk menyelesaikannya. Pemerintah telah mengakui selama bertahun-tahun bahwa perdagangan orang menjadi masalah, namun masalahnya masih belum sesuai dengan prioritas utama Thailand. Pejabat Thailand yang prihatin, secara bertahap meningkatkan kerjasama pemerintah

¹¹² Tier 2 Laos 2003, diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/21276.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

¹¹³ *Thailand Trafficking in Person*, diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/21277.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

¹¹⁴ *Ibid.*

regional dan bilateral, oleh karena itu, pada tahun 2003 Thailand berada dalam kategori Tier 2 dalam *Trafficking in Person*.¹¹⁵

Filipina adalah sumber, transit dan, pada tingkat yang lebih rendah, negara tujuan bagi orang-orang yang diperdagangkan untuk kerja paksa dan eksploitasi seksual¹¹⁶. Tradisi yang kuat di negara yang mencari peluang ekonomi di luar Filipina membuat banyak orang Filipina berisiko melakukan perdagangan manusia. Perempuan Filipina diperdagangkan untuk eksploitasi seksual ke tujuan di seluruh Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika Utara¹¹⁷. Pelaku perdagangan memancing korban di luar negeri dengan janji-janji palsu tentang pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan perdagangan terorganisir internasional dari Tiongkok Daratan melalui Filipina. Sebagai sumber, Filipina adalah tujuan akhir bagi korban dari Tiongkok.

Pemerintah Filipina tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia, namun berusaha untuk mengatasinya. Pemerintah mengakui bahwa perdagangan manusia adalah sebuah masalah dan membutuhkan waktu yang lama dalam memberantas isu. Kesepakatan tahun 2002 antara Filipina, Malaysia dan Indonesia untuk bekerja sama dalam hal kejahatan transnasional, khususnya untuk memasukkan agenda dalam mengatasi perdagangan manusia ke *Jobdesc* polisi, berpotensi menjadi langkah maju yang signifikan. Terlepas dari fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi kemampuannya untuk menyediakan dana yang konsisten, pemerintah tetap melakukan langkah-

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Transnational Crime, diakses dalam <http://www.osetc.gov.ph/index.php/transnational-crimes>

¹¹⁷ Philipines Trafficking in Person, diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/21276.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

langkah baik dalam bidang pencegahan dan perlindungan. Hal inilah yang membuat Filipina berada dalam kategori Tier 2 tahun 2003¹¹⁸.

Selama dekade terakhir, Kamboja telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kemajuan yang terhormat dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan kesehatan dan. Pertumbuhan ekonomi dan integrasi ekonomi yang lebih besar dengan negara Greater Mekong telah membawa perkembangan positif bagi Kamboja seperti peningkatan mobilitas barang, layanan, orang dan uang, akses terhadap pengetahuan dan komunikasi. Hal ini juga membawa peluang bagi kejahatan transnasional untuk berkembang¹¹⁹. Dalam perdagangan manusia, Kamboja adalah negara sumber dan tujuan bagi orang-orang yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa¹²⁰. Laki-laki dan perempuan serta anak-anak Kamboja yang menyeberang ke Thailand, seringkali sebagai migran ilegal, dipaksa bekerja atau dimasukkan ke dalam bisnis prositutsi. Anak-anak Kamboja diperdagangkan ke Vietnam dan dipaksa bekerja sebagai pengemis jalanan. Perempuan dan anak perempuan Vietnam diperdagangkan ke Kamboja untuk menjadi penghibur.

Pemerintah Kamboja tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia; telah berusaha secara signifikan. Hal ini karena sumber daya kepolisian yang terbatas, dan pejabat pemerintah telah mengakui bahwa perdagangan manusia adalah masalah utama yang dihadapi negara tersebut dan telah menerapkan langkah-langkah baru - terutama dalam

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ UNODC, Cambodia Office, diakses dalam <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/cambodia/overview.html> (25/03/2017, 05.00 WIB)

¹²⁰ UNODC Cambodia, *Loc. Cit*

penuntutan dan penegakan hukum - untuk mengatasi tantangan tersebut. Tahun 2003, Kamboja masuk dalam kategori Tier 2¹²¹.

Dalam kejahatan perdagangan manusia, Indonesia adalah negara sumber, transit dan tujuan bagi orang-orang yang diperdagangkan untuk pekerjaan seksual dan kerja paksa. Korban Indonesia diperdagangkan ke Malaysia, Singapura, Tiongkok Taipei, Hong Kong, Brunei, negara-negara Teluk Persia, dan Australia¹²². Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia, namun telah melakukan beberapa usaha dalam menyelesaikan kasus ini. 2002, pemerintah menyetujui undang-undang utama untuk melindungi anak-anak dari perdagangan manusia dan membentuk komisi pengadilan anti korupsi. Pemerintah juga telah menyelesaikan amandemen terhadap kode kriminalnya dan meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku trafiking. Indonesia terbuka untuk kerja sama multilateral untuk memerangi perdagangan manusia - proses kementerian perdagangan Bali adalah contoh yang patut dicatat - namun masih banyak yang harus dilakukan, terutama di dalam negeri. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah mengakhiri partisipasi langsung pejabat publiknya dalam perdagangan manusia. Hal ini yang membuat Indonesia masuk dalam kategori Tier 2 tahun 2003¹²³.

¹²¹ Cambodia Trafficking in Person, Diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/21275.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

¹²² Indonesia Trafficking in Person Tier, diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/21276.htm>

¹²³ *Ibid.*

Dalam kejahatan perdagangan manusia, Malaysia adalah tujuan dan sedikit banyak menjadi sumber dan negara transit dalam bisnis prostitusi. Sebagai negara tujuan, korban berasal dari Indonesia, Thailand, Tiongkok, Filipina, dan Uzbekistan¹²⁴. Pada skala yang lebih kecil, perempuan Malaysia (kebanyakan etnis Tionghoa) diperdagangkan ke Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Tiongkok Taipei untuk eksploitasi seksual, dengan menggunakan jalur udara. Pemerintah Malaysia tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia, namun telah membuat usaha yang signifikan. Malaysia mengakui bahwa perdagangan manusia adalah masalah dan telah melakukan upaya dalam pemberlakuan undang-undang anti migrasi ilegal. Tahun 2003, Malaysia berada dalam kategori Tier 2¹²⁵.

Dalam kasus perdagangan manusia, Menurut Laporan Perdagangan Manusia Pemerintah AS, Singapura adalah negara tujuan bagi perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual . Kebanyakan berasal dari India, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan perjalanan ke Singapura secara sukarela untuk melakukan bekerja ke dalam industri prostitusi atau ditipu dan dipaksa melakukan perbudakan seksual¹²⁶. Sejumlah besar pekerja rumah tangga asing di Singapura menghadapi penyitaan dokumen perjalanan mereka yang tidak sah, dikurung oleh majikan dan disiksa.

¹²⁴ Malaysia Trafficking in person, diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/21276.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Singapore Trafficking in person, diakses dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/105389.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

Pemerintah Singapura belum mematuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia, namun telah mengkriminalkan semua bentuk perdagangan manusia yang parah. Polisi mengadopsi program dan prosedur pelatihan baru untuk membiasakan petugas dengan pelanggaran Undang-Undang Pidana yang baru dan untuk memberi mereka keterampilan untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia yang potensial. Khususnya, amendemen KUHP baru-baru ini juga memperpanjang yurisdiksi ekstra-teritorial atas warga negara Singapura dan penduduk tetap yang mengeksploitasi anak-anak secara seksual di negara lain. Namun pada saat yang sama, dan tidak mengambil tindakan yang memadai untuk melindungi korban perdagangan manusia, terutama pekerja rumah tangga asing yang terkena kondisi kerja paksa. Oleh karena itu, Singapura masuk dalam kategori Tier 2¹²⁷.

Negara Brunei Darussalam adalah negara tujuan bagi orang-orang yang diperdagangkan untuk kerja paksa dan eksploitasi seksual. Sebagian besar perdagangan terjadi dalam konteks ketenagakerjaan, karena pekerja asing direkrut dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Pakistan, India, dan Bangladesh untuk bekerja di industri garmen, pertanian dan di rumah sebagai pelayan¹²⁸. Ada juga sejumlah kecil kasus perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual.

Pemerintah Brunei tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia, tapi Brunei telah melakukan beberapa upaya. Brunei memiliki peraturan tentang imigrasi, ketenagakerjaan, dan agama, namun

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Brunei Trafficking in Person, <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/21275.htm> (25/03/2017, 05.00 WIB)

masih belum terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, Brunei masuk ke dalam kategori Tier 2 tahun 2003.¹²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, korban perdagangan manusia di negara-negara Asia Tenggara tidak hanya berasal dari kawasan ini saja, namun juga berasal dari negara lain. Lemahnya kontrol pemerintah dan perekonomian yang tidak seimbang menyebabkan kejahatan ilegal ini berkembang menjadi bisnis gelap. Sama halnya seperti Tiongkok, negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki status *Tier Trafficking in Person*, dimana status ini menentukan kapasitas sebuah negara dalam mengatur permasalahan kejahatan perdagangan manusia, dan dapat dilihat pada tabel yang sudah dirangkum berikut:

Tabel 2.2
Rangkuman Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

No	Negara	Tier	Korban diperdagangkan ke negara lain	Asal Korban perdagangan manusia dari negara lain
1	Vietnam	2	Tiongkok, Kamboja, Thailand, Malaysia, Laos	Kamboja
2	Myanmar	3	Thailand, Tiongkok, Malaysia	-
3	Laos	2	Thailand	-
4	Thailand	2	Taipei, Malaysia, Korea Selatan, Amerika, Malaysia	Myanmar, Laos, Kamboja, Tiongkok
5	Kamboja	2	Thailand, Vietnam	-
6	Filipina	2	Seluruh Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika Utara	Tiongkok

¹²⁹ *Ibid.*

7	Indonesia	2	Vietnam Malaysia, Singapura, Tiongkok, Brunei, Negara Teluk Persia, Australia	-
8	Malaysia	2	Jepang, Kanada, AS, Australia, Tiongkok	Indonesia, Thailand, Tiongkok, Filipina, Uzbekistan
9	Singapura	2	-	India, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Tiongkok
10	Brunei Darussalam	2	-	Indonesia, Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Bangladesh

2.3 Kerjasama Keamanan ASEAN Tiongkok dalam Mengatasi TOC

Kejahatan perdagangan narkoba dan juga perdagangan manusia yang telah melewati batas-batas wilayah negara menjadi permasalahan serius di Asia Tenggara dan juga Tiongkok. Kejahatan ini tidak hanya menjadi permasalahan satu negara saja, namun melibatkan negara lain yang menjadi sumber ataupun negara yang terkena dampak kejahatan ini.

Dengan berakhirnya Perang Dingin, perubahan signifikan terjadi di Tenggara Asia dan juga Tiongkok. Setelah Perang Dingin, hubungan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN telah memasuki keseluruhan periode sejarah baru. Beijing menghapuskan kebijakan radikal kiri dari "revolusi ekspor" yang diadopsi selama "Revolusi Kebudayaan" dan mengubah pola pikir untuk membedakan teman dan musuh berdasarkan ideologi. Perubahan ini sangat membantu memperbaiki hubungan Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara. Terobosan besar dari Tiongkok adalah normalisasi hubungan antara Tiongkok dan juga negara-negara di Asia Tenggara hingga tahun 1990an.

Kontak formal pertama antara ASEAN dan juga Tiongkok terjadi pada bulan Juli 1991, Ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian Qichen diundang sebagai "Tamu Penting " pada pembukaan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-24, dan berbicara Dengan menteri luar negeri masing-masing negara¹³⁰. Pada tahun 1997 ASEAN dan Tiongkok mengadakan *ASEAN plus One meeting*" (dialog antara ASEAN dan Tiongkok). Selama KTT pertama antara ASEAN dan Tiongkok, keduanya mengeluarkan pernyataan bersama dengan mengumumkan berdirinya "Kemitraan bertetangga dengan baik dan saling percaya yang berorientasi pada tanggal Abad 21". Dalam agenda pembahasan tersebut, ASEAN dan Tiongkok membahas masalah keamanan non-tradisional. Menurut Tiongkok, isu-isu tersebut telah menjadi fitur baru dari lingkungan keamanan internasional dan regional, membawa tantangan baru bagi anggota dari ARF¹³¹.

Dalam membahas isu kejahatan non tradisional pertama adalah kejahatan narkoba. ASEAN sebelumnya pada tahun 1972 mengadakan pertemuan pejabat dan badan terkait mengenai pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, , pada tahun 1976 diadakanlah Deklarasi *ASEAN Concord* oleh Kepala Pemerintahan. Deklarasi ini menyerukan intensifikasi kerjasama antar negara anggota serta dngan badan internasional yang relevan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan narkoba ilegal. Menanggapi deklarasi ini, pada tahun yang sama, diadakan *the First Meeting of*

¹³⁰ He Shan, 2012, *China – ASEAN cooperation : 1991-2011*, diakses dalam http://cn-ph.china.org.cn/2012-02/27/content_4837848.htm (22/06/2017, 21.00 WIB)

¹³¹ *Ibid.*

ASEAN Drug Experts di Singapura¹³². Pertemuan ini merumuskan rekomendasi empat bidang utama seperti penegakan hukum dan undang-undang, pengobatan dan rehabilitasi, pencegahan dan informasi serta pelatihan dan penelitian. Pertemuan tersebut juga merumuskan strategi untuk meningkatkan kerja sama antar negara anggota ASEAN. Badan-badan ASEAN yang terlibat dalam penanganan narkoba berada dalam pengawasan dan kebijakan ; Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional/*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) serta Pejabat Tinggi ASEAN untuk Masalah Narkoba/*ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD)¹³³.

AMMTC dibentuk pada tahun 1997, dibentuk sebagai respon negara-negara ASEAN dalam menanggapi kejahatan transnasional selain perdagangan ilegal narkoba yang melampaui batas-batas nasional. Pada tahun 1999, AMMTC mengadopsi Rencana Aksi ASEAN untuk memerangi kejahatan transnasional/*ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*. Rencana tersebut menetapkan mekanisme dan kegiatan untuk memperluas upaya negara-negara anggota ASEAN memerangi kejahatan transnasional, termasuk penyalahgunaan narkoba dan perdagangan obat-obatan terlarang, dari tingkat nasional dan bilateral hingga dimensi regional serta memperkuat komitmen dan kapasitas regional dalam melaksanakan tugas¹³⁴.

ASOD adalah pertemuan pejabat tinggi ASEAN yang pada awalnya berasal dari kerjasama ASEAN dalam pengendalian narkoba yang berada di

¹³² ASEAN, *Cooperation on Drugs and Narcotics Overview*, diakses dalam http://asean.org/?static_post=cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview (22/06/2017, 21.00 WIB)

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

bawah lingkup *the Meeting of the ASEAN Drug Experts* , yang pertama kali diadakan pada tahun 1976 dan berada di bawah koordinasi *Committee on Social Development (COSD)* . Pertemuan yang diadakan setiap tahun itu kemudian dinobatkan sebagai *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* pada tahun 1984¹³⁵.

Pada oktober tahun 2000, diadakanlah kongres internasional di *United Nations Conference Centre* di Bangkok, Thailand. Kongres ini dihadiri oleh lebih dari 30 pemerintah dan 16 organisasi internasional, dengan tema “*In Pursuit of Drug Free ASEAN 2015 Sharing the Vision and Leading the Change.*” Pertemuan ini diselenggarakan oleh *Royal Thai Government, ASEAN and the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (ODCCP)* yang terdiri dari *United Nations International Drug Control Programme (UNDCP)* dan *Centre for International Crime Prevention*¹³⁶. Pada pertemuan tersebut, para menteri ASEAN sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba dapat mengancam stabilitas kawasan, dan mendesak pemerintah negara-negara anggota untuk meningkatkan kapasitasnya melawan narkoba, khususnya pada obat-obatan seperti ATS. Mereka juga sepakat untuk mewujudkan “*Drug Free ASEAN 2015-2020.*” Delegasi dari Tiongkok yang diwakili oleh Penasihat Negara Luo Gan menyatakan dukungan Tiongkok dalam menciptakan *Drug Free ASEAN*¹³⁷.

¹³⁵ ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*, diakses dalam <http://www.aipasecretariat.org/committee/asod-reports/asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/> (22/06/2017, 21.00 WIB)

¹³⁶ UNODC, *Eastern Horizon, News on the fight against drug and crimes in East Asia and the Pacific*, No. 4 Desember 2000, diakses dalam https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/eastern_horizons/EH04.pdf (22/06/2017, 21.00 WIB)

¹³⁷ *Ibid.*

Kedua belah pihak percaya bahwa isu ini tidak bisa diatasi oleh satu negara saja, melainkan dengan kerjasama dengan negara lain. Kemudian, ASEAN dan Tiongkok bersama-sama meluncurkan mekanisme kerjasama pengontrolan obat sub-regional dengan Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos dan UNDCP dan menandatangani *Action Plan of ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drug* (ACCORD) pada tahun 2000¹³⁸. Tiongkok juga telah mengadakan konferensi kementerian sekuriti empat negara dengan Laos, Myanmar dan Thailand untuk mengidentifikasi bersama¹³⁹. Perdagangan narkoba berada di bagian atas agenda kerjasama ACCORD. Kerjasama dalam menangani perdagangan narkoba dikategorikan menjadi tiga, yaitu dibawah kerangka ASEAN+1 (Tiongkok), ASEAN+3 (Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan), dan dalam kerangka kerjasama *Greater Mekong Sub-Region* (GMS) dan kerjasama antar pemerintah daerah di Tiongkok terutama Provinsi Yunnan yang berdekatan dengan Myanmar, Laos dan Vietnam¹⁴⁰.

Setelah pertemuan yang membahas tentang kejahatan narkoba tersebut, ASEAN dan Tiongkok menyadari bahwa kompleksitas keamanan sebuah negara yang dipengaruhi oleh kejahatan transnasional bukan hanya kejahatan perdagangan narkoba saja. Pada tahun 2002, diadakanlah *Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in The Field of Non Traditional Security Issues* pada November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Deklarasi Bersama ini membahas 8 jenis kejahatan transnasional ; (1) Narkoba Ilegal; (2)

¹³⁸ UNODC, *Eastern Horizon, News on the fight against drug and crimes in East Asia and the Pacific*, Loc. Cit

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Beatrice, *Op. Cit.* Hal. 61

Penyelundupan manusia termasuk perdagangan perempuan dan anak; (3) pembajakan laut; (4) terorisme; (5) penyelundupan senjata; (6) pencucian uang, (7) kejahatan ekonomi internasional ; (8) kejahatan siber¹⁴¹. Setelah deklarasi bersama tersebut, untuk menunjukkan keseriusan antara ASEAN dan Tiongkok, pada tahun 2004 diadakanlah pertemuan antara ASEAN dan Tiongkok dalam *MoU Between the Governments of Member Countries of the ASSOCIATION of Southeast Asian Nations and The Government of The People's Republic of China on Cooperation in the Field of Non Traditional Issues* di Bangkok, Thailand. Dalam kesepakatan MoU tersebut, disebutkan 8 jenis kejahatan transnasional yang harus diatasi oleh ASEAN dan Tiongkok, serta terdapat 9 pasal. 2 pasal yang penting adalah *Area of Cooperation* dan *Impelentation*. Pada pasal bagian *Area of Cooperation* , membahas 4 cara kerjasama, yang setiap cara memiliki poin-poin tersendiri. 4 mekanisme tersebut adalah ; (1) pertukaran informasi; (2) pertukaran dan pelatihan anggota ; (3) Kerjasama badan penegak hukum ; (4) riset bersama¹⁴².

¹⁴¹ ASEAN, *Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues 6th ASEAN-China Summit Phnom Penh, 4 November 2002*, diakses dalam http://asean.org/?static_post=joint-declaration-of-asean-and-china-on-cooperation-in-the-field-of-non-traditional-security-issues-6th-asean-china-summit-phnom-penh-4-november-2002-2 (22/06/2017, 21.00 WIB)

¹⁴² ASEAN, *Memorandum of Understanding Between The Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) And The Government of the People's Republic of China On Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues, Bangkok*, diakses dalam <http://asean.org/memorandum-of-understanding-between-the-governments-of-the-member-countries-of-the-association-of-southeast-asian-nations-asean-and-the-government-of-the-people-s-republic-of-china-on-cooperation-in-t/> (22/06/2017, 21.00 WIB)

Pada poin 2, ditekankan bahwa pihak Tiongkok sebagai kordinator dan fasilitator. Hal ini menunjukkan keserius Tiongkok dalam bekerja sama dengan ASEAN. Dalam pasal *implementation*, disebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam MoU ini adalah Sekretariat ASEAN yang berkordinasi dengan badan-badan nasional yang relevan di negara-negara anggota ASEAN dan Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok¹⁴³. ASEAN kemudian dalam MoU tersebut menyambut baik partisipasi Tiongkok dalam kerjasama ASEAN yang terkait dengan kejahatan transnasional, termasuk dalam *ASEAN Action Plan on the Fight against Transnational Crime and Its Work Program* dari ASOD dan AMMTC. Kerjasama ini bersifat *short term* dan *Long term*, dengan jangka waktu 5 tahun dihitung mulai dari tahun penandatanganan MoU.

Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2004, ASEAN dan Tiongkok melakukan langkah serius dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia. Seperti pembentukan ACCORD yaitu kerjasama khusus antara ASEAN dan Tiongkok dalam mengatasi permasalahan narkoba, pada tahun 2004, ASEAN dan Tiongkok membentuk kerjasama khusus dalam mengatasi perdagangan manusia. Perdagangan manusia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan juga Tiongkok sering terjadi pada kawasan negara-negara Mekong, yaitu negara-negara perbatasan Asia Tenggara dan juga Tiongkok yang perbatasannya dialiri oleh sungai Mekong yang panjang. Negara yang dialiri sungai Mekong tersebut seringkali dijadikan rute untuk melakukan kejahatan perdagangan ilegal, terutama perdagangan manusia karena kurangnya pengawasan di kawasan Mekong.

¹⁴³ *Ibid.*

Negara-negara Mekong ini terdiri dari Tiongkok, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand dan Myanmar. Kerjasama ini bernama *Cordinated Mekong Ministerial Initiative Against Human Trafficking* (COMMIT)¹⁴⁴. COMMIT diresmikan oleh 6 negara pada tahun 2004, pada level Menteri. COMMIT memiliki 4 level kerjasama, yaitu kerjasama dalam level nasional, regional, kerjasama dengan organisasi internasional, dan pihak-pihak terkait dengan isu ini. COMMIT juga berada dalam kerangka kerjasama ASEAN+1. COMMIT berada dalam pengawasan badan PBB yaitu *United Nations Action fot Cooperation against Trafficking in Person* (UN-ACT)¹⁴⁵.

¹⁴⁴ UN-ACT, *Memorandum of Understanding on Cooperation against Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-Region*, diakses dalam <http://un-act.org/publication/view/2004-commit-mou/> (22/06/2017, 21.00 WIB)

¹⁴⁵ *Ibid.*